



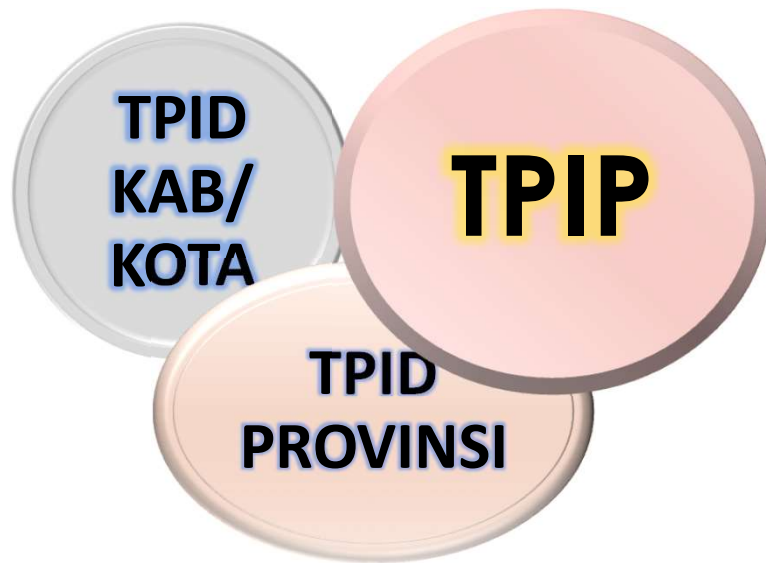
TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL

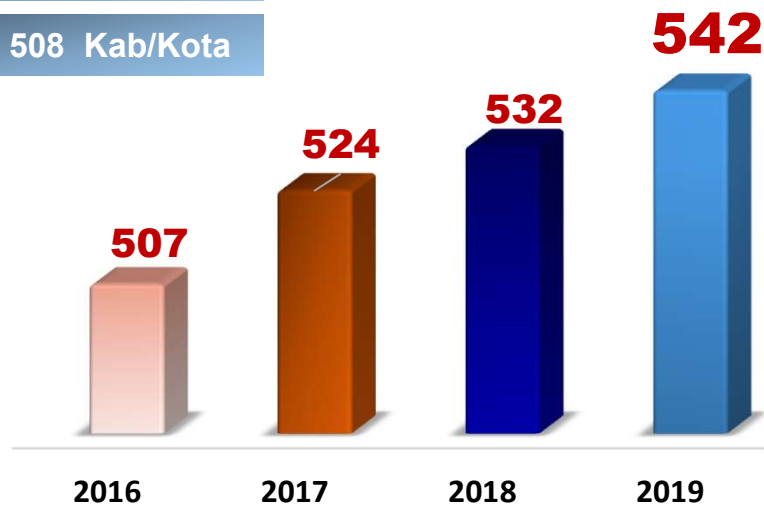
**RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2019
JAKARTA, 25 JULI 2019**

TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL (TPIN)

Ditetapkannya Keppres No. 23/2017 tentang TPIN mengindikasikan semakin seriusnya Pemerintah dalam mengendalikan inflasi.



34 Provinsi
508 Kab/Kota



TPIN	
Ketua	Menko Perekonomian
Waka I	Gubernur Bank Indonesia
Waka II	Menteri Keuangan
Waka III	Menteri Dalam Negeri
Anggota	1. Menteri Perdagangan
	2. Menteri Pertanian
	3. Menteri Perhubungan
	4. Menteri ESDM
	5. Kepala Bappenas
	6. Menteri PU & PR
	7. Menteri BUMN
	8. Sekretaris Kabinet
	9. Kepala Kepolisian RI
Sekretaris	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian

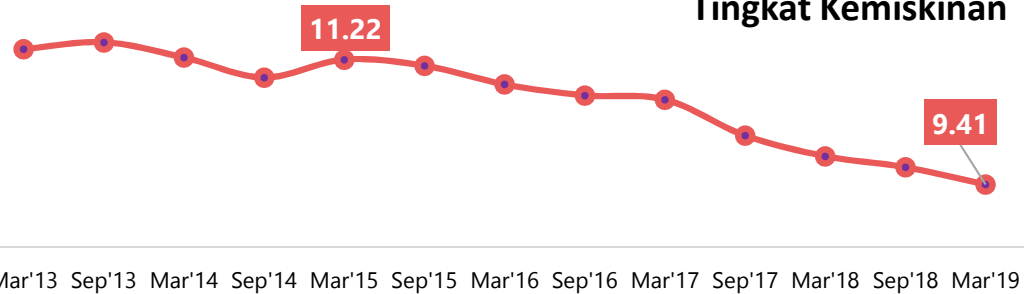
TPID PROVINSI	
Ketua	Gubernur
Wakil Ketua	Kepala Perwakilan BI
Sekretaris & Anggota	Pimpinan OPD terkait

TPID KABUPATEN/KOTA	
Ketua	Bupati / Walikota
Wakil Ketua	Pejabat KPwDN BI
Sekretaris & Anggota	Pimpinan OPD terkait

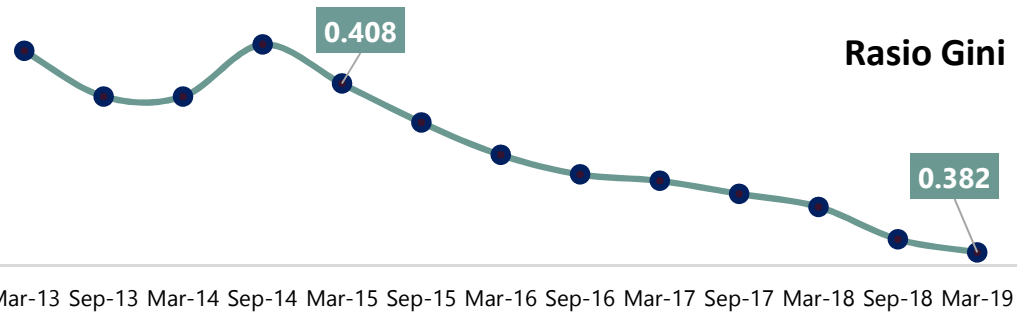
PERTUMBUHAN EKONOMI SEMAKIN BERKUALITAS DIIRINGI INFLASI YANG RENDAH DAN STABIL, SERTA MEMBAIKNYA INDIKATOR SOSIAL

INDIKATOR SOSIAL

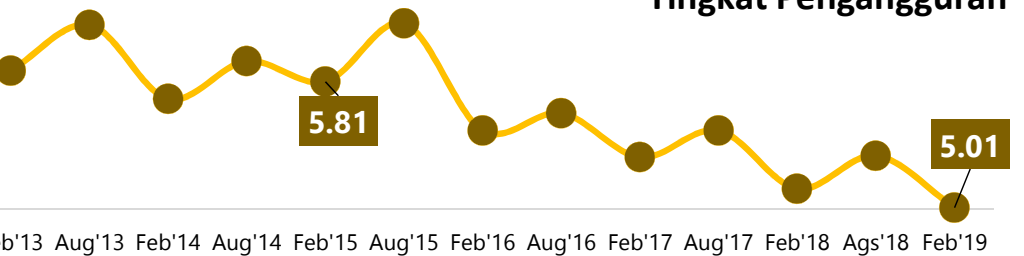
Tingkat Kemiskinan



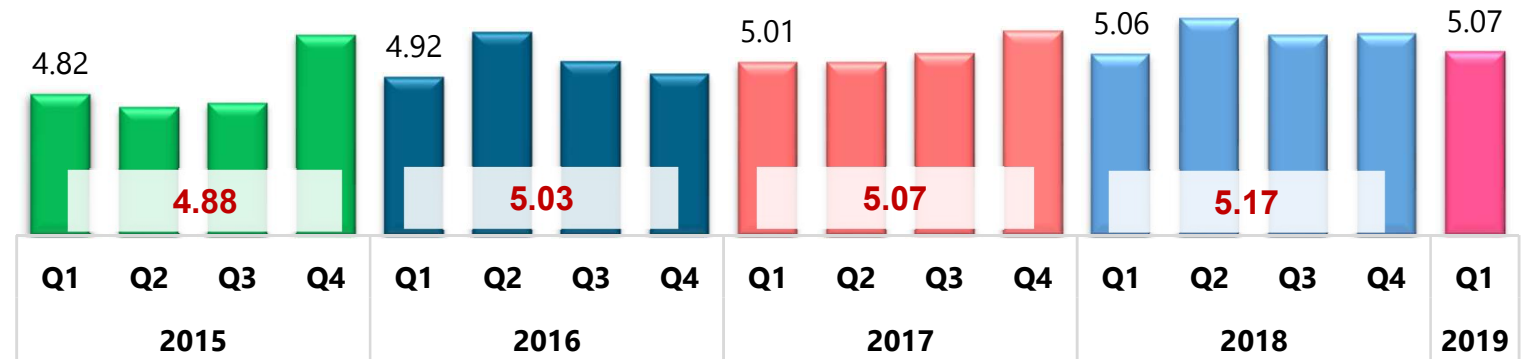
Rasio Gini



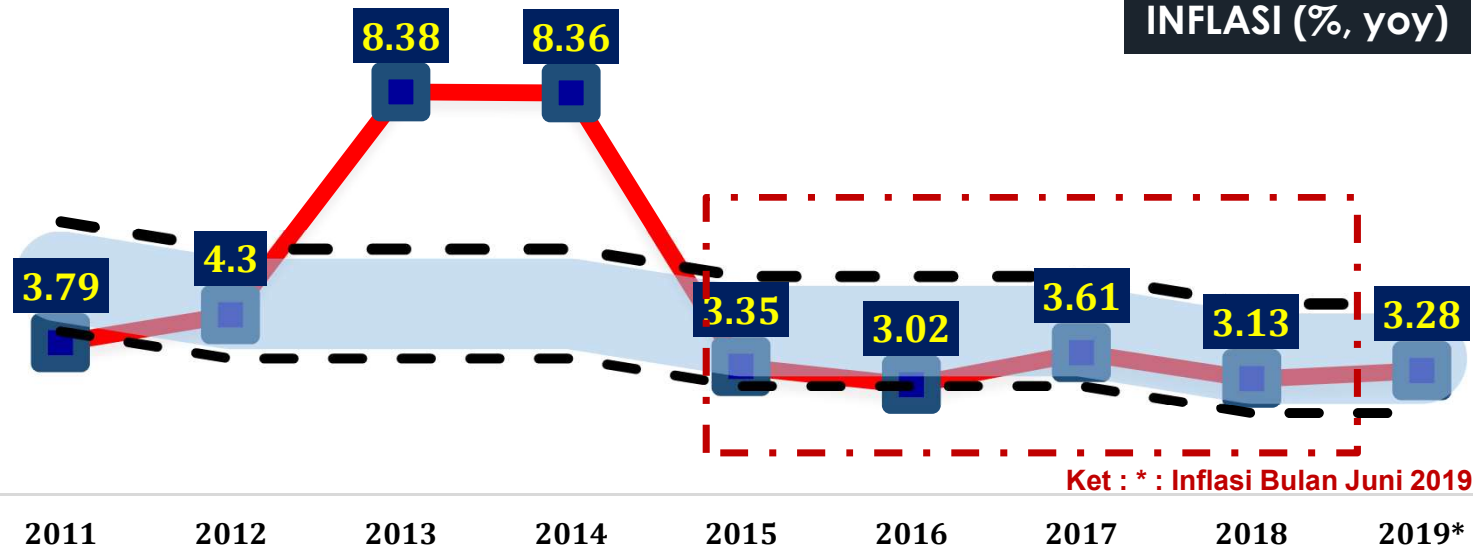
Tingkat Pengangguran



PERTUMBUHAN EKONOMI (% , yoy)



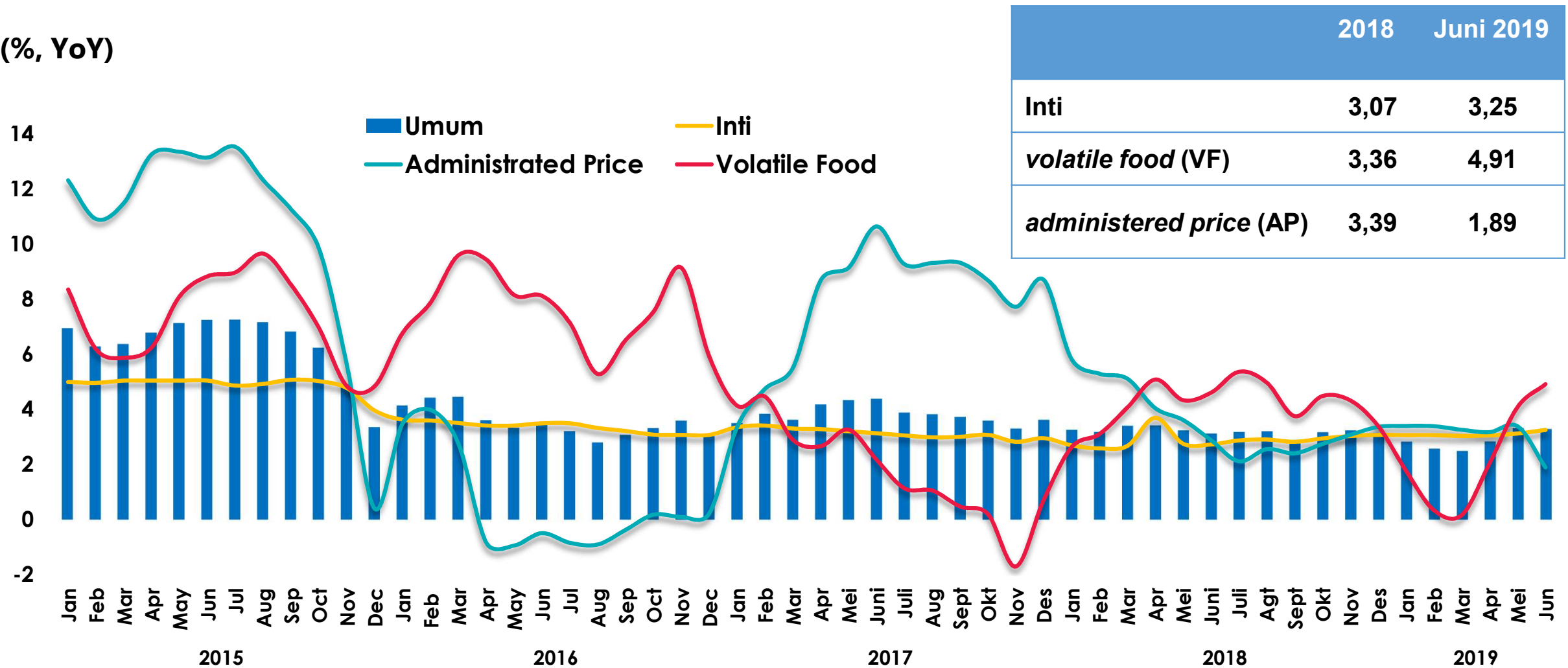
INFLASI (% , yoy)



REALISASI INFLASI TAHUN 2018 DAN SEMESTER I 2019 TERJAGA

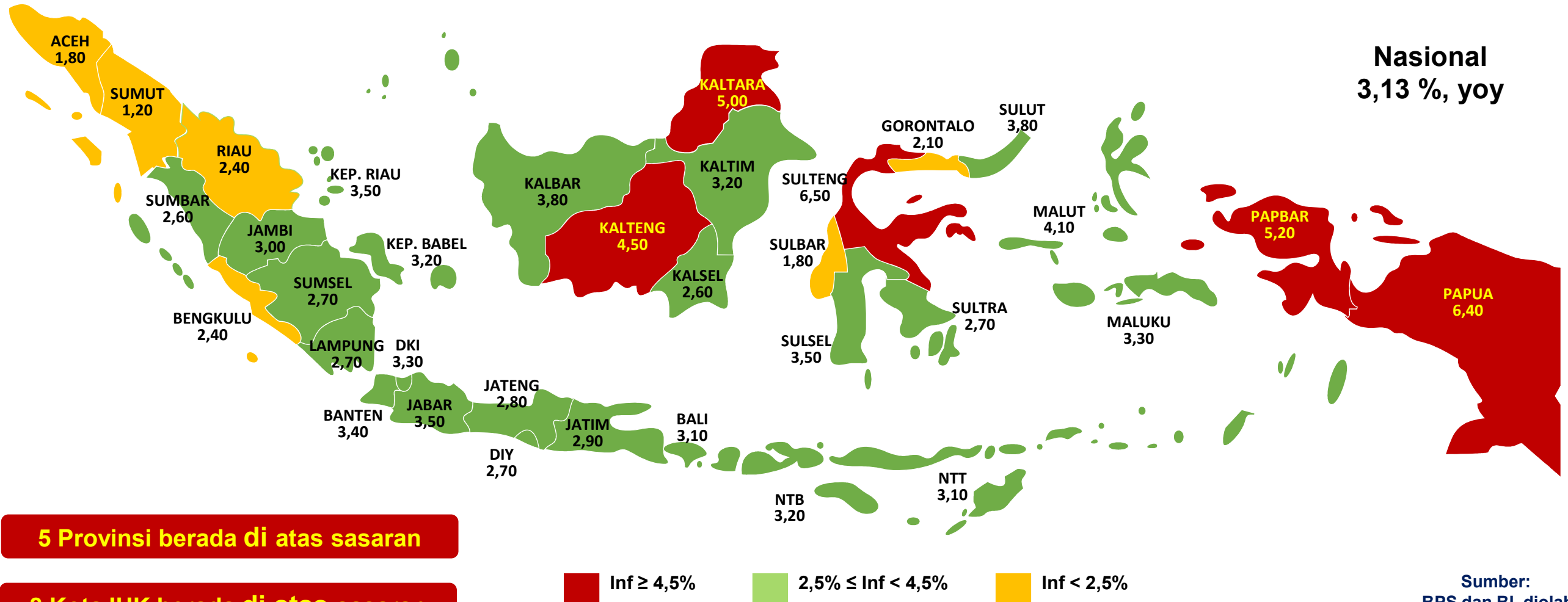
Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi inflasi pada Juni 2019 untuk kelompok volatile food meningkat, sebaliknya kelompok administered price menunjukkan penurunan yang signifikan, sementara kelompok inti relatif terjaga.

(%, YoY)



REALISASI INFLASI 2018 BEBERAPA DAERAH DI LUAR KISARAN SASARAN

Meskipun secara keseluruhan inflasi nasional terjaga dalam rentang sasaran inflasi, namun secara spasial realisasi inflasi di beberapa daerah masih berada di luar rentang sasaran inflasi 2018 ($3,5\% \pm 1\%$)



Sumber:
BPS dan BI, diolah

STRATEGI 4K PENGENDALIAN INFLASI

Terjaganya realisasi inflasi pada tahun 2018 tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui implementasi strategi 4K.



1. KETERJANGKAUAN HARGA

- Koordinasi pelaksanaan KPSH/ Operasi Pasar
- Pelaksanaan Pasar Murah dan penetrasi ke pasar rakyat
- Memastikan implementasi penurunan Batas Atas tarif Angkutan Udara



2. KETERSEDIAAN PASOKAN

- Menjaga ketersediaan komoditas yang memiliki neraca pangan defisit
- Menjaga stok Beras Bulog
- Melaksanakan CBP dengan penggantian



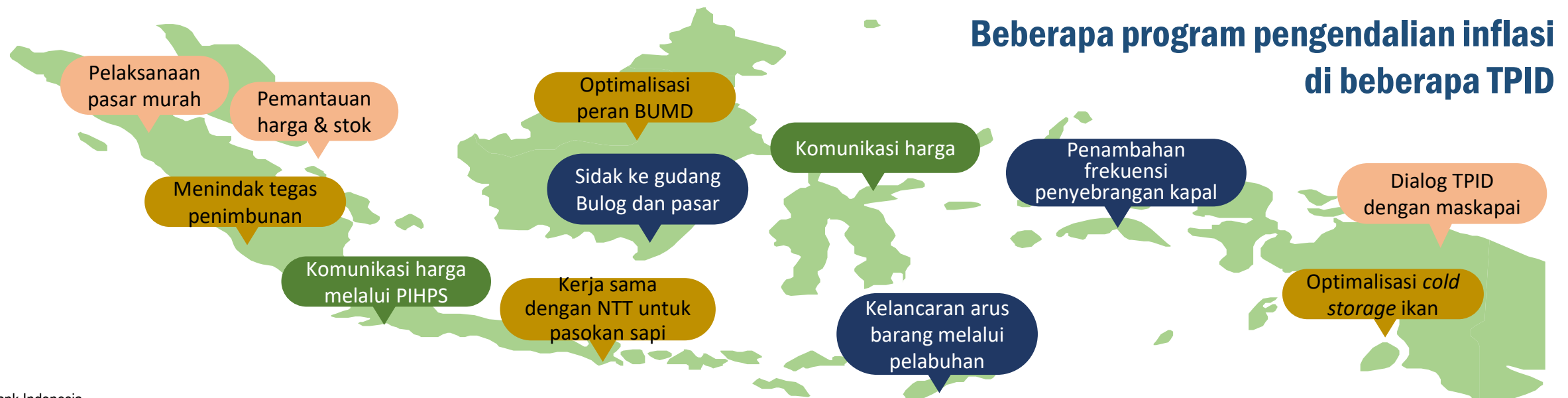
3. KELANCARAN DISTRIBUSI

- Optimalisasi peran Satgas pangan
- Pemantauan harga dan kepatuhan pelaku usaha jasa transportasi



4. KOMUNIKASI EFEKTIF

- Optimalisasi TDPUD untuk memantau stok bahan pangan di pedagang dan distributor
- Mengendalikan ekspektasi inflasi pada HBKN
- Melakukan pemantauan harga (langsung atau melalui PIHPS)



INOVASI KELANCARAN DISTRIBUSI PANGAN YANG MEMANFAATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pembangunan infrastruktur sebagai prasyarat memperlancar konektivitas belum cukup, sehingga perlu dukungan akses langsung ke pasar melalui adanya pasar pengumpul. Dari pasar pengumpul dapat menggunakan moda transportasi yang lebih besar menuju pasar di kota dengan akses jalan tol dan kereta api yang sudah memadai. Seluruh kegiatan distribusi ini juga perlu didukung penggunaan teknologi informasi.



1

Seluruh kepala daerah dan pimpinan kementerian/lembaga diminta untuk benar-benar memperhatikan pertumbuhan dan tekanan inflasi serta mempermudah investasi yang berorientasi ekspor

- Penetapan program kerja koordinasi pengendalian inflasi nasional
- Peta jalan pengendalian inflasi tahun 2019-2021 tingkat nasional dan provinsi
- Kebijakan dalam mendorong daya saing dan investasi

2

Kepala daerah harus memperhatikan pengendalian inflasi dari sisi pasokan pangan, distribusi, & infrastruktur

Pembangunan pasar induk beras dan sarana konektivitasnya di Pare-pare

3

Aparat penegak hukum diharapkan turut andil dalam menjaga mekanisme pasar

Satgas pangan yang didalamnya terdapat unsur penegak hukum secara umum telah berkoordinasi dengan TPID, utamanya pada periode HBKN

4

Pentingnya komunikasi antar daerah dalam mendorong perdagangan antar daerah

pembangunan pusat informasi harga pangan strategis untuk mendukung perdagangan antar daerah

TPID AWARD 2019

Berdasarkan evaluasi kinerja TPID tahun 2018





TERIMA KASIH